

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbanyak ke-empat di dunia. Seperti yang dilansir oleh *CIA world Factbook* tercatat penduduk Indonesia per 1 juli 2015 berjumlah 255.461.700 jiwa, yang menempatkan Indonesia di posisi ke-4 setelah China, India, dan Amerika Serikat (Susanto, 2016). Selain itu, Indonesia juga merupakan Negara yang sangat beragam. Sejak awal diproklamirkan oleh para bapak pendiri bangsa, Negara ini sudah mengambil motto '*bhinneka tunggal ika*' yang artinya 'berbeda-beda tapi tetap satu'. Kebhenekaan Indonesia tercermin dari segi budaya, etnis, bahasa, bahkan agama. Dari segi agama, di Indonesia sendiri terdapat enam agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada sensus sementara penduduk tahun 2015 menunjukkan pemeluk agama Islam berkisar 207.176.162 jiwa atau 87,18% penduduk Indonesia, Kristen (6,96%), Katolik (2,91%), Hindu (1,69%), Budha (0,72%), Konghucu (0,05%), dan kepercayaan lainnya (0,13%) (Badan Pusat Statistik, 2015). Hal ini membuat Indonesia menjadi Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang disusul Pakistan dengan 178 juta jiwa, dan India sekitar 100 juta jiwa (Indrawan, 2015).

Hal ini menurut Hisyam (2006, hal. 1) merupakan kekayaan budaya dan memberikan keuntungan bagi Indonesia karena dapat dijadikan sumber inspirasi yang sangat kaya bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Bahkan, bisa menjadi kekuatan yang dahsyat yang dapat menggerakkan bangsa ini untuk lebih maju lagi (Yewangeo, 2009, hal. 22). Oleh karena itu, keberagaman menjadi sesuatu yang mendukung berkembangnya Negara, dimana agama-agama menjadi kekuatan yang mendukung cita-cita pendirian 1nergy ini.

Tetapi keragaman ini bisa berlaku sebaliknya, ketika keragaman malah menjadi sumber konflik primordial yang hanya menghabiskan energy (Susanti, 2016). Sebagaimana menurut Yewangeo (2009, hal. 22) keberagaman adalah sebuah tantangan pendewasaan, yang sangat tergantung

pada cara menanganinya. Keberagaman akan menjadi sebuah kelemahan jika tidak disikapi dengan arif dan bijaksana. Hal senada diungkapkan Hisyam (2006, hal. 1) keberagaman bisa memicu konflik sosial antar umat beragama yang bisa mengancam keutuhan bangsa, terutama jika keragaman itu tidak disikapi dengan baik. Indonesia sebagai yang sangat beragam pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan konflik sosial karena keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras, etnis, dan golongan (Rumapea, 2014, hal. 18).

Maka, kerukunan umat beragama menjadi sangat penting, terlebih lagi sebagai bangsa yang beragam, maka kerukunan beragama harus menjadi prioritas utama (Syam, 2009, hal. 54). Karena kerukunan antar umat beragama bukan hanya kepentingan satu umat atau agama saja, melainkan kepentingan seluruh komponen bangsa. Hanya dengan kerukunan antar umat beragama kestabilan nasional dapat terjamin, dan hal ini berarti bisa menjamin keberlangsungan pembangunan nasional (Effendi, 2009, hal. 30).

Dalam hal ini agama-agama di Indonesia dapat juga berfungsi sebagai tiang-tiang penopang usaha pembangunan, dimana tugas umat beragama adalah saling membantu menciptakan kesatuan, persatuan, dan terutama kerukunan bangsa Indonesia (Yewangeo, 2009, hal. 21). Terlebih lagi sebagai agama yang paling banyak dianut, Islam ikut andil besar dalam keberlangsungan masyarakat yang beragam ini. Sebagaimana menurut Liliweri (2005, hal. 102) sebagai kelompok mayoritas di dalam masyarakat, Islam memiliki control atau kekuasaan untuk mengontrol. Apalagi, menurut Gollnick & Chinn (1990) dalam (Liliweri, 2005, hal. 103) mengemukakan bahwa kelompok mayoritas sering kali menjadi *dominant culture*, yang artinya adalah budaya yang mendominasi. Hal senada diungkapkan Sairin (2006, hal. 86) kerukunan hidup umat beragama bangsa Indonesia tergantung dari kerukunan hidup umat Islam. Kalau umat Islam yang merupakan mayoritas itu bersatu padu, rukun, maka kerukunan hidup umat beragama serta kesatuan bangsa Indonesia akan terjamin.

Namun, data menyebutkan, dari tahun 2007 sampai dengan 2012, pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama cenderung meningkat, dilihat

dari data pengaduan ke Komnas HAM dan laporan hasil monitoring lembaga-lembaga masyarakat sipil seperti Setara Institute, The Wahid Institute, dan Moderate Muslim Society (Asshiddiqie, 2014). Seperti yang dilansir oleh Komnas HAM (2014) Pelanggaran Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2013, jumlah pengaduan berjumlah 39 berkas, meningkat pada tahun 2014 menjadi 67 berkas. Sementara itu, Nisa (2012) dalam Wahid Institute (2012) mengungkapkan fakta bahwa sepanjang tahun 2012, 40 kasus terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. Menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi paling intoleran, disusul Nangroe Aceh Darussalam (20 kasus), Jawa Tengah (15 kasus), dan Jawa Timur (15 kasus).

Adapaun, menurut Yenny Wahid, dalam Republika Online (2016) menyatakan bahwa faktor pendorong tingginya pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Barat adalah masifnya pertumbuhan kelompok-kelompok intoleran yang seringkali menggunakan isu-isu keagamaan (Tejomukti, 2016). Sementara itu, menurut Aminudin Syarief, peneliti Setara Institute, Bogor meraih skor tertinggi 5,21, Bekasi skornya 4,68, Depok skornya juga tak berbeda jauh yakni 4,58, sementara Bandung skornya 4,16 dan Sukabumi 4,05 (Sarwanto, 2015). Terlebih lagi dengan kasus yang sedang ramai dibicarakan saat ini, dimana terjadi penolakan dan pembubaran paksa kegiatan Kebaktian Pembangunan Rohani (KKR) di Bandung oleh ormas Pembela Ahlus Sunnah (PAS) dan ormas Dewan Dakwah Indonesia (Ramadhani, 2016).

Menurut Mulyadi (2016), dalam Kompas.com, gelar provinsi paling intoleran berpusat pada beberapa wilayah perkotaan yang berkarakter urban dan migran, salah satunya adalah Kota Bandung. Sebagai kota metropolitan terbesar di provinsi Jawa barat, sekaligus menjadi ibukota provinsi ini. Kota yang berpenduduk 2,771,138 jiwa ini merupakan kota terbesar ke tiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya dalam hal jumlah penduduk (Nugroho, 2016). Menanggapi Jawa Barat menjadi provinsi paling intoleran di Indonesia, Bandung sebagai ibukota provinsi tentu saja sangat berpengaruh, walaupun menurut data, kota Bandung menempati posisi keempat (Sarwanto, 2015).

Ditambah lagi terdapat sebuah temuan dimana muncul benih konflik serta kekerasan atas nama agama dengan melibatkan generasi muda (usia SMA, SMK & MA) (Kaawoan, 2014, hal. 65). Menurut Dja'far (2015) dalam Wahid Institute menyatakan bahwa sejumlah temuan memperlihatkan fakta yang bertolak belakang. Kecenderungan intoleransi dan radikalisme terus menguat di kalangan pelajar. Hal ini sungguh ironis, mengingat pelajar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari generasi muda. Generasi muda adalah aset bangsa, yang kelak akan mengganti generasi selanjutnya dalam mengisi kemerdekaan, dan masa depan bangsa di serahkan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, hal. 41). Apa jadinya Negara jika para pemudanya intoleran terhadap perbedaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa toleransi, khususnya para pelajar.

Bahkan, dalam penelitian Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LKIP), yang memungkapkan bahwa secara umum guru PAI memiliki rasa toleransi yang lebih rendah dengan para pelajar. Sebut saja mengenai bertetangga dengan non muslim ada 14,3% responden guru dan 17,5% responden pelajar mengatakan keberatan untuk hanya sekedar bertetangga dengan non muslim (Baedowi, 2015, hal. 196). Bahkan, menurut temuan Man Whitney dan Wilcoxon W, didapati rasa intoleransi lebih tinggi terdapat di sekolah swasta ketimbang di negeri. Dalam hal ini, swasta yang dimaksud adalah sebagian besar yang berafiliasi ke yayasan/organisasi Islam tertentu (Baedowi, 2015, hal. 197).

Padahal pendidikan mesti membangun pemahaman keberagaman peserta didik yang lebih inklusif dan pluralis (Muliadi, 2012, hal. 55). Masalahnya adalah bagaimana Pendidikan Agama berperan membina toleransi, khususnya ketika guru dan siswa yang meraka bina memiliki tingkat toleransi yang rendah. Apalagi, pendidikan agama memainkan peran penting dalam menentukan rasa toleransi siswa (Baedowi, 2015, hal. 197). Hal ini bisa dilihat dari pelajaran agama di sekolah cenderung hanya mengajarkan keimanan dan pencapaiannya menuju surga tanpa dibarengi dengan kesadaran berdialog dengan agama-agama lain. Ini menjadikan pendidikan agama sangat eksklusif dan tidak toleran (Muliadi, 2012, hal. 55).

Ini menarik perhatian penulis, bagaimana Islam adalah agama yang mengajarkan rasa toleransi di dalam ajarannya, tetapi lembaga pendidikannya malah mengungkap hal yang sebaliknya.

Seperti sabda Nabi Muhammad saw.;

Agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus dan toleran {HR. Ibnu Abdi Syaybah dan Bukhari}. (Miswari, 2007, hal. 158)

Hadis ini merupakan salah satu hadis nabi yang secara eksplisit menjelaskan betapa pentingnya posisi toleransi dalam Islam (Miswari, 2007, hal. 158). Tidak hanya agama Islam yang mengajarkan nilai toleransi pada ajarannya, dimana menurut Haidar, Budihardjo, & Sutikno (2015, hal. 2) agama Kristen juga menjadikan toleransi sebagai sebuah konsep yang mempunyai dasar yang kokoh dalam Alkitab:

Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel dari antaramu, kasihilah dia seperti dirimu sendiri, sebab kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir (Im 19:33-34) (Haidar, Budihardjo, & Sutikno, 2015, hal. 2).

Dewasa ini, pendidikan agama sedang mendapat tantangan karena ketidakmampuannya dalam membebaskan peserta didik keluar dari eksklusifitas beragama. Wacana kafir-iman, muslim-non muslim, surga-neraka seringkali menjadi bahan pelajaran di kelas selalu diindoktrinasi (Muliadi, 2012, hal. 62). Pendidikan harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang ada (Muliadi, 2012, hal. 59). Dengan menyadari bahwa masyarakat kita terdiri dari banyak suku dan berbeda agama, maka pencarian bentuk pendidikan yang sesuai dengan pluralitas ini mutlak diperlukan. Yaitu suatu bentuk pendidikan yang berusaha menjaga kebudayaan suatu masyarakat. Pendidikan yang menumbuhkan nilai-nilai persahabatan antara siswa yang beraneka ragam suku, ras, dan agama (Suardi, 2012, hal. 190)

Apalagi, menurut Sairin W. (2006, hal. 110) menjelaskan bahwa pendidikan berperang penting dalam praktek toleransi di masyarakat. Dia menjelaskan bahwa pentingnya penanaman nilai-nilai pendidikan toleransi

dalam kehidupan bermasyarakat, reaktualisasi agama untuk menghilangkan dualism nilai melalui pengajar agama, dan pengajaran agama harus memanankan sifat toleransi dimulai dari tingkat SMA. Sayangnya menurut Nursisto (2008:138) pendidikan agama baik di sekolah umum maupun sekolah agama lebih bercorak eksklusif. Seharusnya pendidikan agama dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan moralitas universal yang ada dalam agama-agama sekaligus mengembangkan teologi inklusif dan pluralis (Muliadi, 2012, hal. 56). Terlebih lagi dewasa ini, pendidikan agama sedang mendapat tantangan karena ketidakmampuannya dalam membebaskan peserta didik keluar dari eksklusifitas beragama. Wacana kafir-iman, muslim-non muslim, surga-neraka seringkali menjadi bahan pelajaran di kelas selalu diindoktrinasi (Muliadi, 2012, hal. 62).

Lembaga pendidikan merupakan wadah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berilmu pengetahuan serta tahu aturan-aturan dan norma-norma yang harus ditaati sehingga terwujudnya kerukunan hidup di dalam masyarakat yang berbeda-beda agama (Laswati, 1981, hal. 12). Dimana Manusia dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Manusia sepanjang hidupnya melaksanakan pendidikan. Bila pendidikan bertujuan membina manusia yang utuh dalam semua segi kemanusiaannya, maka semua segi kehidupan manusia harus bersinggungan dengan dimensi spiritual (teologis), moralitas, sosialitas, emosionalitas, rasionalitas (intelektualitas), estetis dan fisik (Muhaimin, 2009, hal. 315). Pendidikan harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang ada (Muliadi, 2012, hal. 59).

Toleransi beragama merupakan salah satu formula mengelola keberagaman (Susanti, 2016). Dalam hal ini, pendidikan adalah jalan menuju sikap tolerans tersebut, semakin lama orang bersekolah, maka semakin tinggi tingkat kognisinya dan kemampuan menerima perbedaan (Baedowi, 2015, hal. 195). Sekolah berkontribusi untuk memperkuat pemahaman toleransi yang basis pengetahuan dan pengalaman hidup siswa menghargai perbedaan

dan keberagaman (Kaawoan, 2014, hal. 68). Lingkungan sekolah juga memegang peranan penting dalam mengembangkan toleransi beragama. Dimana di sekolah anak dapat memahami perbedaan agama dan kebiasaan yang dilakukan masing-masing agama (Republika Online, 2008). Tambah Nordin (2007, hal. 103) sekolah adalah tempat membangun kepribadian dan pemikiran terbuka bagi setiap pelajar serta menuju kehidupan yang budaya dan berakhlak.

Dari sinilah peneliti mengangkat tema toleransi di kalangan pelajar. Dengan membandingkan tingkat toleransi di kalangan pelajar khususnya, antara pelajar di sekolah SMA yang berafiliasi pada lembaga Islam (SMA Islam) dan pelajar di sekolah SMA yang berafiliasi pada lembaga Kristen (SMA Kristen), untuk melihat sejauh mana kedua lembaga yang berbeda naungan agama ini memerankan fungsinya untuk menanamkan sifat toleran pada para pelajarnya. Dalam hal ini di kota Bandung. Mengingat Kota ini bisa jadi mewakili Jawa Barat sebagai provinsi paling intoleran di Indonesia. Melalui perbandingan yang dilakukan, kita bisa melihat gambaran bagaimana sikap toleransi ataupun intoleransi lahir yaitu dari lembaga pendidikan. Dari sini, kita bisa belajar bagaimana sikap toleransi bisa lahir dan bisa menghindari atau mencegah sebab lahirnya rasa intoleransi. Mewujudkan kerukunan dan toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama merupakan bagian usaha menciptakan kemaslahatan umum serta kelancaran hubungan antara manusia yang berlainan agama, sehingga setiap golongan umat beragama dapat melaksanakan bagian dari tuntutan agama masing-masing dan ikut dalam bagian pembangunan bangsa.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka peneliti melihat beberapa indikasi permasalahan penelitian yang terdapat di atas. Antara lain:

1. Meningkatnya tingkat intoleransi dewasa ini.
2. Temuan ironis mengenai meningkatnya tingkat intoleransi di kalangan pelajar.
3. Sekolah tidak berperan secara signifikan untuk meningkatkan rasa toleransi kepada para pelajar.

4. Pendidikan agama tidak mengajarkan bagaimana peserta didik harus memiliki sifat toleran.
5. Sekolah (SMA) swasta, khususnya yang berafiliasi dalam lembaga Islam memiliki tingkat intoleransi yang lebih tinggi ketimbang sekolah (SMA) umum lainnya.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian ini adalah meningkatnya tingkat intoleransi di kalangan pelajar SMA, dimana hal ini malah banyak terjadi di SMA Islam. Dari sinilah terdapat beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat toleransi di kalangan pelajar SMA di Kota Bandung?
2. Bagaimana perbandingan tingkat toleransi pelajar di SMA Islam dan di SMA Kristen di Kota Bandung?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat toleransi di kalangan pelajar SMA di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui perbandingan tingkat toleransi pelajar di SMA Islam dan di SMA Kristen di Kota Bandung.

### **E. Hipotesis**

Adapun hipotesis yang disusun dalam penelitian ini antara lain:

1. Tingkat toleransi pelajar di SMA Islam dan pelajar di SMA Kristen adalah sama.
2. Tingkat toleransi pelajar di SMA Islam dan pelajar di SMA Kristen adalah berbeda.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah antara lain:

1. Manfaat teoretis



Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif, berupa pengetahuan tentang bagaimana tingkat rasa toleransi di kalangan pelajar. Sebagaimana kita ketahui kalau pelajar adalah generasi muda penerus bangsa.

## 2. Segi kebijakan

Dari segi kebijakan, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa masukan atau saran bagi disusunnya sebuah kebijakan baik ditataran pemerintahan pusat, daerah bahkan kebijakan dari sekolah itu sendiri agar pelajar sebagai generasi muda, penerus bangsa, maupun peserta didik memiliki tingkat toleransi yang tinggi.

## 3. Manfaat praktis.

Penyusun berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terutama orang-orang yang berhubungan dengan dunia pendidikan baik di lingkungan pendidikan keluarga, masyarakat hingga sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dalam upaya penanggulangan meningkatnya rasa intoleransi di kalangan pelajar.

## 4. Bagi siswa

Hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran pada pelajar mengenai tingkat toleransi di kalangan mereka dan menjadi acuan dalam bertindak untuk kedepannya.

## 5. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan keilmuan bagi peneliti tentang tingkat toleransi di kalangan pelajar. Dalam kesempatan lain, penelitian ini akan mendorong peneliti untuk terlibat aktif dalam penanggulangan intoleransi di kalangan pelajar.

## 6. Segi isu sosial

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif tentang rasa toleransi. Mengingat toleransi adalah kunci kita untuk tetap bisa

melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih lagi sebagai bangsa yang majemuk.

### **G. Struktur Organisasi Skripsi**

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman proposal ini, maka peneliti menyajikan proposal ini dengan sistematika sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan, peneliti menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, dan manfaat penelitian hingga struktur organisasi penelitian.

Pada Bab II, Tinjauan pustaka, peneliti menyajikan kajian mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain berisi urgensi kerukunan antar umat beragama, konsep toleransi beragama, dimensi toleransi, serta indikator toleransi.

Pada Bab III, Metodologi penelitian, peneliti membahas metode penelitian yang akan digunakan dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. dimulai dari pendekatan, desain penelitian yang akan menggambarkan penelitian ini secara umum, Partisipan penelitian, populasi dan sampel dari penelitian ini, instrument penelitian, prosedur penelitian, analisis data hingga waktu dan jadwal pelaksanaan penelitian.